

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah Etnonasionalisme Terhadap Bubarnya Imperium Uni Soviet, Masa Mikhail Gorbachev (1985 – 1991). Menurut pengamat penulis sejarah menunjukkan bahwa Uni Soviet merupakan wujud ekspansi dan kolonisasi Rusia yang panjang selama berabad-abad. Heterogenitas budaya etnis itu tidak mendapat posisi yang wajar dalam konfigurasi Uni Soviet, sementara budaya Rusia terlalu dominan sebagai hasil dari proses rusifikasi.

Dari sini muncul konflik etnis yang meminta untuk pecah dari negara Uni Soviet. Banyak ketidakadilan yang membuat para etnis ini terus bergejolak untuk terus melakukan gerakan etnonasionalisnya, dan ini terbukti setelah reformasi Gorbachev yang mana tidak mempunyai perhatian yang dalam terhadap faktor etnonasionalisme. Reformasi Gorbachev yaitu perestroika dan glasnost lebih merupakan impian tinimbang agenda yang sistematis. “Keberhasilan” glasnost dan kegagalan perestroika telah membawa Uni Soviet pada fase krisis berikutnya, yaitu semakin melemahnya pusat dan semakin meningkatnya tuntutan-tuntutan merdeka dan pemisahan diri. Secara khusus, glasnost telah membangunkan raksasa etnonasionalisme yang tidur sehingga menjelma dalam bentuk gerakan-gerakan etnonasionalis di hampir seluruh republik. Dari sini munculnya sebuah disintegrasi yang mana tuntutan-tuntutan self determination dari gerakan-gerakan

etnonasionalis dan separatis di beberapa bagian negara Uni soviet. Sebuah negara yang terdiri dari banyak bangsa dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, meskipun dalam satu sisi bisa menjadi faktor perkaya budaya bangsa tapi persatuan dan kesatuan yang telah lama di banggakan sebagai puncak kejayaan negara komunis dunia yang menerapkan teori-teori marxisme-leninisme dibawah pemerintahan stalinis, dan teori-teori tentang negara komunis di uni soviet bisa dibilang retorika belaka atau telah runtuh.

Maka kebangkitan gerakan-gerakan etnonasionalis tidak dapat dibendung banyaknya konflik-konflik etnis horisontalpun semakin membesar. Semua dinamika itu akhirnya membawa Uni soviet pada disintegrasi karena tidak ada kekuatan yang mampu untuk membendung gerakan-gerakan etnonasionalis yang menuntut pemisahan diri dan merdeka. Sebenarnya Banyak kendala yang harus dihadapi oleh Gorbachev selain konflik etnis di beberapa bagian Uni Soviet. Tetapi Gorbachev lebih banyak mengalami kegagalan bahkan kemerosotan kondisi yang semakin parah, tanpa adanya keberhasilan dan perbaikan keadaan dalam menuju perwujudan ideologi komunis yang diinginkan. Usaha Gorbachev hanya berhasil dibidang ekonomi dan meluncurkan sektor swasta dan koperasi untuk memenuhi perekonomian negara.

Maka atas pertimbangan tersebut penulis memberanikan diri untuk mengambil judul **“MENGUATNYA GERAKAN ETNONASIONALISME TERHADAP DISINTEGRASI UNI SOVIET MASA MIKHAIL GORBACHEV (1985 – 1991)”** dimana judul ini diangkat untuk membahas fenomena yang

terjadi sejak masa sejarah pembubaran uni soviet sampai periode Mikhail Gorbachev.

### **B. Latar Belakang Masalah.**

Wacana politik nasional dan internasional semenjak sekitar satu dasawarsa terakhir ini berkembang antara lain sekitar pengertian (Inggris) "*civil society*", yang dapat di Indonesiakan menjadi "masyarakat madani". Sebagai agenda perjuangan sosial-politik, masyarakat madani menghendaki terwujudnya kebebasan-kebebasan kewargaan (*civil liberties*) yang memadai, khususnya kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Momentum peluncuran agenda perjuangan itu ialah keadaan di Uni Soviet disebabkan inisiatif-inisiatif Mikhail Gorbachev untuk melakukan *glasnot* dan *perestroika*, tokoh sentral "Bangsa Rusia Baru".

Gambaran negara Uni soviet sebagai negara "tirai besi" yang selalu tertutup di bawah ideologi komunis telah berubah dengan munculnya konsep pembaharuan yang dikibarkan oleh Mikhail Gorbachev. Sejak tahun 1985 dimana pada tahun itu Mikhail Gorbachev diangkat sebagai Presiden Uni soviet dan Sekretaris Jendral PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) yang menggantikan *Constantin Chermenco* yang meninggal pada tanggal 11 maret 1985

Ide Gorbachev tentang pembaharuan itu sendiri merupakan terobosan baru dalam upaya mengejar ketertinggalan masyarakat Uni Soviet dari negara-negara Eropa Barat, dengan tidak menghilangkan jati dirinya sebagai negara sosialis-komunis.

Uni Soviet dilanda dengan berbagai masalah dalam bidang ekonomi dan politik. Karena dalam bidang ekonomi pembangunan Uni Soviet sangat merosot tajam dan Gorbachev menginginkan adanya pembaharuan radikal yang lebih cepat. Sedangkan dalam politik Gorbachev ingin adanya keterbukaan yang mana tidak ada lagi pemerintahan memusatkan semua perencanaan di pusat. Keadaan ini mengakibatkan kelambanan dan berbagai macam sisi negatif lainnya. Maka untuk menyelesaikan berbagai macam masalah ekonomi dan politik di Uni Soviet, Gorbachev mengeluarkan beberapa konsep yang terkenal dengan apa yang dinamakan "*Glasnost, Perestroika dan demokratizatsiya*".

Banyak kendala yang harus dihadapi, menjadikan Gorbachev lebih banyak mengalami kegagalan bahkan kemerosotan kondisi yang semakin parah, tanpa adanya keberhasilan dan perbaikan keadaan dalam menuju perwujudan ideologi komunis yang diinginkan. Usaha Gorbachev hanya berhasil dibidang ekonomi dan meluncurkan sektor swasta dan koperasi untuk memenuhi perekonomian negara.

Puncak akumulasi dari rangkaian negatif ini adalah munculnya sentimen nasionalisme lokal yang kuat dan menimbulkan gerakan separatis.

Nasionalisme terwujud mulai dari gerakan-gerakan politik baru yang mencakup spektrum tujuan-tujuan dan wawasan yang luas dengan diikuti oleh rasa kebangsaan dan ketidakadilan sejarah. Aksi unjuk rasa yang bersifat etno-nasionalisme semakin banyak di Uni Soviet sejak Gorbachev berkuasa.

Inilah mengapa Hendrik Smith mengatakan adanya ancaman bagi keutuhan bangsa Rusia yang tidak dapat mengatasi semangat nasionalisme lokal

dan gerakan separatisme yang berkekerasan, birokrasi yang kolot dan kepala batu, dan sikap umum rakyat yang masa bodo kepada kerja, suatu "budaya iri hati".<sup>1</sup>

Nasionalisme yang terwujud dalam pendekatan-pendekatan di republik-republik mendorong akan hilangnya kontrol Kremlin terhadap beberapa republik minoritas yang mungkin akan menenggelamkan program-program demokrasi politik Gorbachev. Sejumlah republik bahkan bertindak lebih jauh dengan menyatakan dihapuskannya monopoli kekuasaan Partai Komunis di wilayahnya. Mereka menyatakan bahwa hukum yang mereka buat sendiri yaitu hukum nasional republik memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat.

Akhirnya gerakan etnonasionalisme menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara republik, serta keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Uni Soviet yang berpusat di Kremlin.

Peristiwa pemisahan diri ini dimulai oleh Estonia yang sejak bulan November 1988 memulainya dengan mendeklarasikan kedaulatan dan menyatakan memiliki wewenang untuk memveto setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Tindakan Estonia ini segera diikuti oleh republik lainnya yang sekawasan yaitu Lithuania dan Latvia, kemudian baru republik lain mengambil tindakan serupa sehingga pada bulan September 1991 sudah 13 republik yang memerdekakan diri.

Ada beberapa pemikiran tentang definisi etnonasionalisme yaitu seperti Peter M. Leslie, Hans Khon, Ernest Gellner yang pada inti dari *etnonasionalisme*

---

<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, *Kebebasan dan Supremasi Hukum, Dua Asas Masyarakat Madani*, <http://yahoo.com>.

adalah penonjolan diri dari kelompok-kelompok etnik yang menjadi kontribusi pada formasi sebuah masyarakat yang berbeda, yang lainnya dalam batas-batas satunegara.<sup>2</sup> Etnonasionalisme bisa dilihat dari segi positif dan negatifnya karena berbagai macam suku etnis dan bermacam-macam kebudayaan yang akan menjadi suatu kebanggaan tertinggi dalam memperkaya khazanah budaya tapi bila tidak dikelola akan bisa menjadi penyebab keruntuhan bangsa dan kehancuran negara. Karena ketika berkembang akan menjadi gerakan politik dimana sebuah kelompok menuntut untuk pemerintahan sendiri. Bagi mereka yang berada dalam kekuasaan, mobilisasi politik dari kelompok etnik dapat menjadi fenomena yang mengancam. Akan menyebabkan kekacauan dan perpecahan atau pelanggaran terhadap hak-hak, status dan privilese kelompok-kelompok lain.

Disintegrasi Uni Republik-Republik Soviet Sosialis (URSS) atau Uni Soviet yang terjadi pada akhir era Mikhail Gorbachev (1985 – 1991), 31 Desember 1991, merupakan klimaks dari perjalanan sejarah negara Uni Soviet yang dibentuk oleh Vladimir Ilyich Lenin pada 30 Desember 1922. Disintegrasi Uni Soviet ini merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindarkan karena banyaknya warisan persoalan masa lalu sejak era Lenin, Stalin, Khrushchev dan Brezhnev. Dimensi persoalan itu cukup kompleks menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Karena dari masa Lenin sampai Gorbachev daerah-daerah rusifikasi banyaknya ketidakjelasan terhadap ekonomi, pemerintahan yang tidak adil dari pusat (moskow) dan yang terutama adalah masalah etnis di daerah-daerah

---

<sup>2</sup> Fadli Zon, *Gerakan Etnonasioalis: Bubarnya Imprium Uni Soviet*. (Jakarta: PT Surya Multi Grafika, 2002) hal 22.

penyatuan Uni Soviet. Kebijakan-kebijakan dari Lenin pun sangat berubah-  
sebelum dan sesudah Revolusi, yang akhirnya menunjukkan pendekatan yang  
pragmatis. Lenin memberikan Fondasi penyatuan bangsa-bangsa itu dengan  
dengan konsep Sliyanie (fusi) dan sblizhenie (pengerucutan) dalam kerangka  
tujuan jangka panjang sosialisme. Kebijakan etnonasionalisme Stalin cenderung  
tidak memberi ruang bagi pengembangan budaya etnis, sebaliknya Rusia sentris.

Rusifikasi yaitu (Proses Pen-Rusia-an) bangsa-bangsa non Rusia ke dalam  
kebudayaan Rusia, yang sejarah prosesnya juga tidak dapat dinyatakan oleh  
tanggal, bulan dan tahun tetapi melainkan proses yang berlangsung terus-menerus  
mewarnai identitas itu dari masa ke masa. Namun dari proses sejarah itu dapat  
dipahami bagaimana karakter peng-Rusia-an yang turut menentukan lahirnya  
negara Uni Soviet dan akhir dari episode Uni Soviet.

Rusifikasi pada fase Imperium Rusia Raya (Tsar) banyak melakukan  
berbagai cara yang telah memerintah selama tiga abad (17, 18, 19) dengan sistem  
otokrasi (*autocratic*) dan otoriter (*authoritarian*) yang menjadikan kekuatan  
kekaisaran sangat centralizea (kekuasaannya terpusat) dalam pemerintahan di  
Imperium Rusia Raya. Kekuasaannya terus meluas dengan adanya ekspansionis  
dan melakukan Proses alam migrasi yang terus meningkat karena hukuman  
terhadap orang-orang yang ingkar agama yaitu ajaran kristen ortodoks yang  
sebagai agama resmi negara yang bersifat messiah (mesianisme Rusia) yang  
mengajarkan kepada rakyat tetap taat kepada raja (tsar), hidup sesudah mati,  
ketidak taatan sebagai tindak kejahatan yang akan kena sanksi. Selain itu  
mesianisme Rusia juga menjelaskan ketakterpurukan sejarah Rusia lewat doktrin

Moskow sebagai Roma ketiga yang sesudah runtuhnya oleh Roma (Italia) dan Konstantinopel (yunani). Rusifikasi yang dilakukan telah menjadikan wilayah Imperium Rusia Raya sangat luas dari wilayah timur sampai selatan berkat ekspansionis dan messiah. Tetapi dengan adanya sebuah rusifikasi ini muncul gerakan-gerakan pemberontakan untuk melawan kekuasaan Tsar tapi gerakan separatis ini masih bisa diatasi dengan kekuatan armada perang Imperium Rusia Raya dan tidak seimbang dengan kekuatan gerakan separatisme yang melawan kekuasaan Tsar.

Namun pada tahun 1905 dapat dilihat kecenderungan bersatunya kepentingan etnonasionalis dengan kelompok revolusioner yang bertendensi ke arah revolusi sosial yang terkenal dengan Minggu Berdarah. Momentum revolusi dimanfaatkan untuk menaikkan posisi tawar masyarakat non Rusia dalam konfigurasi imperium Rusia sebagai reaksi terhadap rusifikasi yang dilakukan pemerintahan pusat (Rusia) terhadap wilayah-wilayah hasil ekspansi yang non Rusia.

Dalam momentum revolusi pada tahun 1905 terus berulang yang mana gerakan etnonasionalis selalu muncul sebagai faktor yang turut menentukan proses dan akhir dari sebuah krisis. Baru pada tahun 1917 telah menjadi titik terang bagi kalangan revolusioner yang disebabkan terlibatnya Imperium Rusia Raya pada Perang Dunia I setelah terjadinya Perang Saudara. Upaya keras Imperium Rusia Raya dalam Perang Dunia I untuk merebut dan mempertahankan wilayah hingga tahun 1917 telah melemahkan pemerintahan pusat dan menguatkan posisi kalangan revolusioner. Keadaan ini memicu terjadinya revolusi 1917 yang dikenal



dengan revolusi bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin yang diangkat sebagai kepala pemerintahan Soviet pada Kongres Seluruh Rakyat Rusia.

Melalui awal dari Perang Saudara pada tahun 1918 dan diakhiri dengan pendirian Uni Republik–Republik Soviet Sosialis (URSS) atau disingkat menjadi Uni Soviet dan keikutsertaan dalam Perang Dunia II yang memang telah menjadi ciri khas pada zaman Tsar yaitu Ekspansionisme dalam merebutkan negara–negara yang telah lepas akibat revolusi Bolshevik, maka lengkaplah Uni Soviet menjadi 15 Negara Republik dan sejak akhir dari Perang Dunia II, Uni Soviet telah menjadi salah satu dari dua negara adidaya di dunia.

Dengan begitu maka sejak zaman Tsar sampai berdirinya Uni Soviet tidak lepas dari Proses Rusifikasi Yang dijiwai pada sifat gerakan ekspansionis dan kolonialisme bagi terciptanya rusia yang besar dan Imperium yang paling berkuasa. Maka negara Uni Soviet merupakan perpanjangan ambisi dari masa lalu yang telah menjadi Pola sejarah Rusia sejak awal berdirinya Rusia. Meskipun berbeda di dalam bentuk, yaitu Federalisme dalam kaitan dengan bangsa – bangsa non Rusia, namun esensinya tetap sama bahwa rusia menjadi pemimpin dalam konfigurasi Uni Soviet.

Maka dari Reformasi Gorbachev yaitu perestroika dan glasnost lebih merupakan impian tinimbang agenda yang sistematis. “keberhasilan” glasnost dan kegagalan perestroika telah membawa Uni Soviet pada fase krisis berikutnya. Yaitu semakin melemahnya pusat dan semakin meningkatnya tuntutan–tuntutan merdeka dan memisahkan diri. Faktor etnonasionalisme menjadi faktor yang penting dalam menelaah proses disintegrasi Uni Soviet. Pernyataan kedaulatan

negara-negara bagian bekas Uni Soviet menjadi negara merdeka menunjukkan sentimen etnonasionalis yang kental yang tidak sanggup lagi ditahan pemerintahan pusat (Moskow) sehingga puncaknya terjadi disintegrasi. Gerakan etnonasionalisme itu merupakan puncak dari ekspresi kultural republik-republik yang tertindas.

Sebuah konflik etnis yang telah meruntuhkan kesatuan dan persatuan Uni Soviet yang telah bangkit dari revolusi Gorbachev inilah yang harus dicegah dalam sebuah negara yang memulai demokrasi secara keterbukaan dalam segala bidang. Dimana adanya sebuah lembaga atau badan untuk memantau dan tidak terjadinya sebuah diskriminasi yang bisa menimbulkan gerakan etnis dalam sebuah negara. Di Uni Soviet pada program pemerintahan Mikhail Gorbachev sangat kurang memperhatikan dalam mencegahnya sebuah konflik etnonasionalis dan mengenai perlindungan hak-hak etnis minoritas.

Sebuah konflik yang sudah lama di kekang oleh rezim Lenin dan Stalin yang menjaga tetap utuh negara komunis dan pemerintahan diktator Uni Soviet, kini mencuat dan menjadi sebuah gerakan etnonasionalis dalam perpecahan dan kehancuran negara Uni Soviet. Kegagalan sebuah revolusi Gorbachev lewat glasnost, perestroika dan demokrasi telah membawa negara Uni Soviet ke dalam disintegrasi dalam "*Bubarnya Uni Soviet Lewat Gerakan Etnonasionalisnya*".

### C. RUMUSAN MASALAH.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

“Mengapa gerakan etnonasionalisme semakin menguat di Uni Soviet pada kekuasaan Gorbachev ?”

#### **D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.**

Teori merupakan konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada gerakan etnonasionalisme terhadap bubarnya Uni Soviet, penulis menggunakan teori dan kerangka konseptual sebagai acuannya, antara lain:

##### **1. Teori Nasionalisme**

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “*Nation*”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.<sup>3</sup>

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (*political legitimacy*). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri

---

<sup>3</sup> Wikipedia Indonesia, ensiklopedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>

mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negri itu, simalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentraman yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya mengumpulkan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang cukup ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah '*national state*' adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri.

Pengertian Nasionalisme juga dikatakan perasaan yang mengikat atas dasar kesamaan asal-usul, rasa kekeluargaan, rasa memiliki hubungan-hubungan yang lebih dengan sekelompok orang daripada dengan orang-orang lain. Dan mempunyai perasaan berada di bawah satu kekuasaan. Nasionalisme

diperkuat oleh adanya tradisi-tradisi, adat-istiadat, dongeng-dongeng dan mitos-mitos, serta oleh satu bahasa yang sama, semangat kebangsaan.

Nasionalisme merupakan fenomena yang kompleks karena konotasi dan interprestasinya yang kaya sebagai hasil studi yang demikian beragam sepanjang masa. Dalam konteks pertama, nasionalisme sebenarnya sulit dibedakan dari patriotisme atau cinta pada tanah air dan bangsa. Dalam konteks ini, nasionalisme tidak berhubungan dengan asal ras, asal etnis atau asal nenek moyang atau dengan sifat-sifat budaya yang nyata seperti bahasa atau agama. Sedangkan dalam konteks kedua, nasionalisme merupakan sebuah bentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas tinimbang teritorial. Dalam konteks ini nasionalisme merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok-kelompok lain dalam sebuah komunitas.

Nasionalisme dalam hal ini menjadi sebuah ide politik yang sudah pasti tentang bangsa, tetapi lebih dari itu menghubungkan bangsa dengan esensi politik yaitu negara, dan mengklaim bahwa setiap bangsa harus mempunyai negara sendiri. Salah satu persoalan itu adalah faktor etnonasionalisme, yaitu nasionalisme yang berdasar pada etnik atau bangsa dari republik-republik atau negara-negara bagian selain Rusia dalam konfigurasi Uni Soviet dan Etnik non Rusia dalam Republik Federasi Soviet Sosialis Rusia (RFSSR).

Beberapa pemikiran lain masalah nasionalisme, pada dasarnya intinya adalah "penonjolan diri dari kelompok-kelompok etnik".<sup>4</sup> Penonjolan diri ini dapat memperkuat identitas kelompok atau menyatakan superioritas dan agresifitas. Hans Kohn<sup>5</sup> menjelaskan nasionalisme sebagai kerangka berpikir, dimana kesetiaan utama dari individu diserahkan pada negara-bangsa. Kesetiaan ini dapat menjadi motivator positif dan negatif.

Ernest Gellner<sup>6</sup> membagi doktrin nasionalisme dalam tiga komponen. Pertama, antropologi filosofis: manusia mempunyai kebangsaan sebagaimana mereka mempunyai sebuah hidung dan dua mata, dan ini merupakan bagian pusat dari keberadaan mereka. Kedua, pernyataan psikologis: mereka ingin hidup berdampingan dengan orang yang mempunyai kesamaan kebangsaan, dan yang lebih penting mereka tidak suka jika diperintah oleh mereka yang berbeda kebangsaan. Ketiga, pernyataan evaluatif. Sementara Elie Kedourie menyatakan bahwa doktrin nasionalisme menandakan seluruh manusia itu dikenal melalui karakteristik tertentu yang dapat diketahui dengan pasti, dan bahwa satu-satunya tipe pemerintahan yang sah adalah pemerintahan nasional sendiri (berdasarkan bangsa itu).<sup>7</sup>

Sebagai doktrin politik, nasionalisme, menurut Ernest Gellner<sup>8</sup> berusaha membuat kebudayaan dan pemerintahan menjadi kongruen (sama). Nasionalisme tidak hanya merupakan akar doktrin demokratis dari penentuan

---

<sup>4</sup> Uri Ra'anan, "The Nation-State Fallacy," dalam Montville, *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies* (Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1990), hal 150.

<sup>5</sup> Hans Kohn, *Nationalism: Its Meaning and History* (New York: D. Van Nostrand, 1965), hal 9.

<sup>6</sup> Ernest Gellner, *Thought and Change* (Chicago: University of Chicago Press, 1964), hal. 150

<sup>7</sup> Elie Kedourie, *Nationalism* (London: Hutchinson, 1979), hal 9.

<sup>8</sup> Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca: Cornell University Press, 1983), hal 43.

nasib bangsa sendiri (*national self-determination*), tetapi juga mengarah pada konflik tentang harus masuknya budaya-minoritas dalam negara.

Dalam sebuah minoritas etnik, terutama yang kurang beruntung tumbuhnya sentimen etnonasional dapat merupakan fenomena positif bagi rasa keanggotaan komunitas dan bagi perkembangan pribadi mereka, yang tidak dapat terjadi kecuali dalam konteks sosial. Atas dimensi kolektif yang amat dibutuhkan bagi perkembangan pribadi.

Namun etnonasionalisme dapat pula dilihat dari sisi lain yang tidak positif, yaitu ketika etnonasionalisme berkembang menjadi gerakan politik dimana sebuah kelompok menuntut pemerintahan sendiri. Bagi mereka yang berada dalam kekuasaan, mobilisasi politik dari kelompok etnik dapat menjadi fenomena yang mengancam. Etnonasionalisme dalam hal ini dapat menyebabkan kekacauan dan perpecahan atau pelanggaran terhadap hak-hak, status dan privilese kelompok-kelompok lain. Karenanya oposisi atau kekhawatiran terhadap etnonasionalisme dapat ditentukan juga diantara anggotanya etnis mayoritas yang dominan atau diantara minoritas-minoritas yang hanya mempunyai sedikit kekuasaan. Bahkan, menurut Leslie antinasionalisme dalam hal etnis dapat juga ditemukan di dalam kelompok etnik sendiri, karena etnonasionalisme dapat berkaitan dengan intoleransi. Dalam bentuk yang lebih radikal, hal ini dapat mengancam hak-hak istimewa dan martabat elit-elit tradisional, yang kompromi-kompromi mereka di masa lalu dengan kelompok etnik dominan dapat dengan mudah dijadikan sasaran tembak. Maka, banyak mereka yang berkepentingan bersandar pada

penggalan organisasi-organisasi etnonasional, memperkecil sentimen etnonasional, dan mengurangi penonjolan etnisitas dalam kehidupan politik.

## 2. Separatisme

Gerakan separatis ini bisa timbul karena ketidakpuasan yang berlarut-larut atas pemerintahan atau kepemilikan identitas teritorial yang berbeda atau ideologi yang dapat mendorong suatu masyarakat untuk menolak wewenang pemerintahan di wilayahnya. Gerakan separatis merupakan tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk negara tersendiri atau sebatas otonomi internal yang bebas dari pengakuan negara induk. Tuntutan-tuntutan separatis ini biasanya ditolak oleh pemerintahan pusat karena dapat mengancam integritas politik dan wilayahnya.

Jika identitas etnis terkombinasi dengan keyakinan *self determination* yang kuat maka keinginan untuk memisahkan diri semakin kuat pula. Perjuangan kaum separatisme untuk memperoleh kemerdekaan misalnya sering disertai atau identik dengan upaya pemisahan diri dari kekuatan dominan (negara induk). Kaum separatis lebih memilih sendiri atau bergabung dengan negara lain yang mempunyai persamaan, karena itu akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengurus masalah-masalahnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain.



Menurut Allen Buchanan ada tiga alasan yang mendorong timbulnya separatisme di suatu negara<sup>9</sup>, *pertama*, peninjauan kembali (*redictatory justice*), *kedua*, pembagian yang tidak merata (*discriminatory redistribution*) dan yang *ketiga*, alasan perlindungan budaya (*cultural self preservation*). Alasan pertama menyatakan bahwa seseorang mempunyai bukti secara historis atas wilayah tertentu, argumen kedua merupakan yang paling sering terjadi dan merupakan faktor dasar dari alasan pemisahan diri yaitu adanya aturan atau sesuatu kebijakan tersebut menguntungkan suatu pihak tetapi merugikan pihak yang lainnya dan yang ketiga berasal dari keinginan untuk memelihara budaya, tradisi, agama dan bahasa dari dominasi etnis mayoritas.

Menurut Walter S Jones,<sup>10</sup> masalah separatisme meliputi berbagai masalah yang terdiri dari akibat ekonomi, akibat politik, dilema moral dan tapal batas kolonial. Yang mana unsur tersebut dapat dibahas sebagai berikut :

- a. *Akibat Ekonomi*, meskipun masalah territorial dalam separatisme bermula sebagai masalah etnis, namun masalah tersebut akan berlanjut kemasalah ekonomi dan sumber daya alam.<sup>11</sup> Program ekonomi Uni Soviet pada masa Gorbachev adalah meningkatkan ekonomi yang terpuruk dengan revolusinya glanost (keterbukaan) yang bertujuan segala bentuk menyimpang dalam praktek ekonomi untuk bisa diketahui oleh masyarakat, tetapi sejak pemerintahan Lenin pembagian yang tidak

<sup>9</sup> Allan Buchanan, *Self Determination and Right to Secede* dalam Journal of International and Public Affairs, vol 45 no 2 Winter 1992, School of International and Public Affairs, Columbia University New York, hal 353-357.

<sup>10</sup> Walter S Jones, *Logika Hubungan Internasional, Ekonomi-Politik Internasional dan tatanan Dunia*, Gramedia Jakarta 1996.

<sup>11</sup> *Ibid* hal 187

merata membuat ketidakpercayaan pada semua republik-republik yang diberlakukan dengan tidak adil yang lebih mengutamakan pemerintahan pusat di Kremlin.

- b. *Akibat Politik*, masalah politik juga adalah bagian dari unsure konflik. Karena di sini ikatan budaya geografis akan selalu melekat di karakter mereka. Mereka bisa menerima otoritas pusat asalkan mereka bisa mengontrol politik di daerah mereka sendiri. Contohnya disemua republik-republik Uni Soviet perpolitikan dikuasai oleh minoritas rusia dan di kuasai oleh pusat, yang telah menimbulkan sensitif yang luar biasa dalam perkembangan masyarakat.
- c. *Dilema Moral*, masalah moral bisa juga sebagai masalah munculnya separatisme yaitu sebuah hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun kerumitan etnogeografis tak memungkinkan dunia mendukung setiap kelompok yang ingin menghendaki kelompok sendiri.<sup>12</sup> Bila semua republik-republik Uni Soviet memisahkan diri maka akan terdapat puluhan negara-negara kecil yang terdiri 15 republik. Maka upaya Gorbachev dalam menjaga keutuhan Uni Soviet dengan perjanjian uni baru yang mengizinkan pemisahan diri 6 republik yang memboikot referendum. Sebaliknya 9 republik yang tetap berada dalam uni mendapatkan 2/3 perusahaan kecil dan menengah, pembebasan harga

---

<sup>12</sup> *ibid* hal 187

sesuai prinsip ekonomi pasar dan larangan aksi mogok yang bermotif politik.<sup>13</sup>

- d. *Tapal Batas Kolonial*, banyak kaum minoritas yang frustrasi menyalahkan imperialis yang menyebabkan permasalahan mereka, pelanggaran garis etnis dilakukan hanya untuk menandai kekuasaan colonial yang merupakan hasil dari kesepakatan negara besar. Sedangkan garis batas jarang memperlihatkan garis alam pusat pemukiman suatu bangsa dengan bangsa lain.<sup>14</sup> Disinilah kehancuran Uni Soviet yang mana batas – batas sebuah kultur budaya etnonasionalis tidak mendapat sebuah prioritas di dalam republiknya. Sebuah diskriminasi terhadap wilayah dan budaya terhadap etnis asli dalam wilayah tersebut tidak ikut dalam perpolitik wilayahnya dan ketidak inginan mereka untuk kembali dalam rezim Stalinis yang memerintah secara otoriter dan sentralisasi dengan berlandaskan komunis–sosialisme.

### 3. Teori Konflik

Mengarah pada kepentingan–kepentingan kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada cara dimana konflik kepentingan itu menghasilkan perubahan sosial dengan terus menerus. Apakah angka perubahan itu minimal atau maksimal, ada kaitannya dengan kelompok yang lebih kuat. Kelompok yang lebih kuat akan lebih mudah memaksakan kemauan dan tujuannya sedang kelompok yang lebih kecil akan mudah

<sup>13</sup> Hazairan Pohan, *Dimensi – dimensi Krisis dalam negeri Uni Soviet*, Kompas 12 Juni 1991. hal 6

<sup>14</sup> Walter S Jones, *Logika Hubungan Internasional, Ekonomi-Politik Internasional dan tatanan Dunia*, Gramedia Jakarta 1996. hal 188.

terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis. Maksimal dan minimalnya perubahan akan ditentukan masing-masing kelompok yang berinteraksi dalam konflik tersebut.

Perubahan tersebut akan bersifat memaksa bagi siapa yang kalah. Dalam memaksakan perubahan itu tergantung kemampuannya untuk memenangkan dukungan dari sebagian besar masyarakat. Menurut Doyle Paul Jones secara umum, konflik dijelaskan bahwa :

- a. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan.
- b. setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dari konflik.
- c. setiap elemen dalam suatu masyarakat menunjukkan desintegrasi dan perubahan.
- d. setiap masyarakat di dasarkan pada pemaksaan dari beberapa anggota atas orang lain.<sup>15</sup>

Negara-bangsa modern merupakan temuan yang relatif baru, sebab sebagian besar spesies manusia tidak pernah terlibat dengan negara apa pun, atau di identifikasikan dengannya. Negara-bangsa, nasionalisme, dan identitas nasional sebagai bentuk organisasi dan identifikasi kolektif bukanlah fenomena “alamiah”, tetapi merupakan ciptaan sejarah-budaya yang bersifat berubah-ubah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Doyle Paul Jones, *Teori Sosiologi Konflik, Klasik Dan Modern*, Terjemahan RM Z Lawing, Gramedia Jakarta 1999.

<sup>16</sup> Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktik*, Cetakan pertama, ( yogyakarta: PT Bentang Pustaka, February 2005).

Penulis juga menggunakan teori konflik etnis menurut Milton J. Esman. disini Esman menyatakan<sup>17</sup> :

*Cultural different, can result from language, races, nation experience, or combination of these factors, which are almost, always descriptive. These coextensive identities are activated by the presence of one more communities of strangers – other ethnic group... As actual or competitor within the relevant political or economic space of the ethnic group, in the contemporary world of territorially defined political authorities, ethnic conflict occur within the frame work of a single state.*

Dari uraian teori tersebut, bahwa konflik etnik terjadi dalam suatu masyarakat negara disebabkan adanya perbedaan dalam masyarakat itu sendiri. Esman menerangkan bahwa faktor yang mendukung adanya konflik etnis yaitu : agama, ras, nasionalisme, persaingan politik, masalah ekonomi. Teori ini digunakan untuk mengemukakan asal mula konflik dan relevansinya pada faktor-faktor internal atau eksternal yang ada.

Dari teori di atas maka di Uni Soviet, jika dilihat komposisi etnis yang dimiliki dapat digolongkan kedalam negara yang multietnis dalam arti terdapat adanya suatu pluralisme etnis. Yaitu keadaan masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya, atau doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan di suatu negara harus dibagi-bagikan antara pelbagai golongan karyawan dan tidak dibenarkan

---

<sup>17</sup> Milton J. Esman, *Political and Psychiatry in Ethnic Conflict*, Dalam Josep V. Mountville, ed, conflict and peace making in multy ethnic societies. Lexington Book, Dc Heath and Company/Lexington massachusset, Toronto, 1990, hal.53.

adanya monopoli suatu golongan.<sup>18</sup> Selanjutnya, dalam suatu masyarakat yang multietnis dalam pengertian pluralisme secara kultural, terdapat adanya kelompok yang mendominasi terhadap lainnya. Ini dinyatakan oleh M. G. Smith bahwa jika terdapat suatu pluralisme etnis, maka terdapat kecenderungan yang mengarah pada dominasi dari salah satu kelompok itu.<sup>19</sup>

Bahkan menurut *Josep Rothschild* dalam teori etnis menyatakan bahwa salah satu pola dari stratifikasi etnis yang penting secara politik dalam negara multietnis adalah suatu mayoritas yang dominan secara politik versus suatu atau beberapa minoritas yang subordinat.<sup>20</sup> Selanjutnya Rothschild juga menyatakan<sup>21</sup>:

*"... Image of ethnic domination and subordination and ask what it means for an ethnic group to be dominant over one or more other group, our probe bring us back to value, norms, good, and goals... standard and cultural maker as normative for the society as a whole. The subordinates are thus confronted with dilemma of either striving to meet those standard, that is of competing with dominants on the letter's home ground, as it were, or of challenging them, which requires a heavy investment in group solidarity."*

Disini Rothschild menjelaskan bahwa dalam hal ini, etnis dominan adalah pihak mayoritas, yang tidak hanya dominan dari segi jumlah, namun secara politik pun mereka mendominasi pemerintahan. Kelompok elite penguasa dan pemerintahan adalah identik dengan orang-orang mayoritas. Sementara etnis subordinat adalah pihak minoritas baik dari segi jumlah dan

<sup>18</sup> B. N. Marbun, S.H., *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hal 441.

<sup>19</sup> M. G. Smith, "Some Developments in the Analytic Frame Work of Pluralisme", dikutip dari Donald, L. Harowitz, *Ethnic Group In Conflict* (University of California Press, 1985), hal. 137.

<sup>20</sup> Josep Rothschild, *Ethnopolitics: A Conceptual Frame Work* (Columbia University Press, New York, 1981), hal 71

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.103.

posisi politiknya. Oleh karena itu, di Uni Soviet segala peraturan dan hukum negara yang dibuat adalah berdasarkan atas nilai-nilai dan norma-norma pokok dari etnis mayoritas (Russia) yang dimanifestasikan dalam bentuk ideologi nasional. Dengan demikian, dapat dipahami, jika komposisi kelompok elit penguasa atau pemerintahan di Uni Soviet hanya merupakan cermin dominasi etnis mayoritas (russia). Serta pembentukan ideologi nasional pun tidak lepas dari dominasi politik dan kultural etnis mayoritas (Russia).

Alasan memusatkan perhatian pada konflik etnis adalah sebagian besar konflik-konflik ini berkobar di negara-negara miskin. Akibatnya, konflik-konflik ini semakin memperparah kemiskinan Negara-negara ini dengan hancurnya basis-basis ekonominya yang memang telah rapuh dan menimbulkan penderitaan tiada akhir terhadap generasi demi generasi rakyatnya. Selain itu, ada bahaya bahwa beberapa konflik etno-politis meluas secara internasional, yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, dan karenanya metode-metode untuk menghindarkan atau menyelesaikannya secara damai merupakan suatu keniscayaan.

Etno-nasionalisme adalah identitas individu terhadap kelompok etnis atau nasionalnya. Emosi yang berhubungan dengan identitas etnik biasanya sangat kuat sekali. Identitas etnik seringkali dilihat sebagai kepanjangan identitas kekeluargaan; hal ini memberikan kita rasa 'kekeluargaan' yang lebih luas yang memperbesar rasa kepemilikan kita. Pengorganisasian ke dalam kelompok-kelompok etnis menempatkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam persaingan kelompok. Kelompok identitas etno-nasional memainkan

peranan utama dalam situasi konflik. Manakala kelompok-kelompok itu mendapat tekanan politik, ekonomi, lingkungan, atau militer, mereka bisa menjadi jahat (*malicious*). Ada kecenderungan menyerang kelompok-kelompok luar (*outgroups*) jika hal itu terjadi.

Konflik etno-nasional atau etno-politik dapat didefinisikan sebagai konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan dirinya dengan menggunakan kriteria komunal dan mengemukakan tuntutan-tuntutan atas nama kepentingan kolektif kelompoknya terhadap negara, atau terhadap aktor komunal lainnya. Konflik etnis melibatkan gerakan-gerakan 'irredentist' (pencaplokan), 'secessionist' (pemisahan), atau anti kolonial. Konflik etno-nasional berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa; dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus.<sup>22</sup> Konflik etno-nasional yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai 'kekerasan komunal' (*communal violence*) dan perang internal wilayah<sup>23</sup>. Dalam kajian ini konflik 'intrastate' dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini kira-kira berhubungan dengan apa yang disebut 'etno-nasionalis' Konflik etnis telah menjadi fenomena yang meluas.

Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah (perilaku etnonasional) tidak digerakkan oleh elit (*not elite driven*),

---

<sup>22</sup> El Fatih A. Abdel Salam, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik*, [http://www.scrips,ohiou.odo/news/cmdd/artikel\\_of.htm](http://www.scrips,ohiou.odo/news/cmdd/artikel_of.htm)

<sup>23</sup> *ibid*



sebagaimana fenomena politik lainnya, melainkan digerakkan massa (mass driven). Jika demikian halnya, maka (perilaku etnonasional itu) mempunyai akibat-akibat penting untuk mencari jalan pemecahannya. Misalnya, komponen kunci dalam demokrasi 'consociational' adalah kerjasama kelompok elit.<sup>24</sup>

Secara historis, Rusia memang dikenal sebagai negara otokratis. Selama abad ke-20, Rusia melakukan dua kali eksperimen demokrasi, tetapi kemudian kandas oleh gelombang kekacauan. Eksperimen pertama terjadi pada era Tsar Nicholas II (1868-1918), penguasa monarki terakhir, ketika Duma (parlemen) dibentuk melalui dekret bulan Oktober 1905.

Akan tetapi Duma hasil pemilihan bulan Maret-April 1906 hanya berusia 72 hari. Bulan Juni 1906, para anggota Duma praktis tidak bisa lagi mengadakan sidang karena gedung parlemen terkunci atas perintah tsar. Selama era kekuasaan Nicholas II, Duma beberapa kali dibentuk, tetapi secara final dibubarkan awal Oktober 1917.

Kehidupan demokrasi Rusia dimatikan sejak revolusi kaum komunis 24-25 Oktober 1917. Selama 70 tahun di bawah era komunisme, kehidupan demokrasi Rusia benar-benar dipasung. Puluhan juta orang Rusia tewas dalam petualangan politik, ekonomi dan sosial kaum komunis.

Fajar baru dalam demokrasi kembali terbit di Rusia ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet tahun 1985. Gorbachev segera melancarkan pembaharuan dengan program restrukturisasi

---

<sup>24</sup> *ibid*

(*perestroika*) dan keterbukaan (*glasnot*) di Uni Soviet, yang terdiri dari Rusia dan 14 republik lainnya.

Maka dari itu reformis yang telah dilakukan Mikhail Gorbachev sangat bisa dikatakan jadi ajang untuk melarikan diri dari ketidakadilan pemerintahan Uni Soviet yang sejak dulu dikenal tangan besi. Karena sejak zaman Lenin sudah menjadi diktator dalam pemerintahannya dan juga rusifikasi Rusia yang dilakukan oleh kekaisaran Rusia yang hanya digunakan dalam pelebaran kekuasaan Uni Soviet. Tapi dari rusifikasi Rusia yang dilakukan oleh kekaisaran Rusia banyak melakukan paksaan untuk mendukung usaha rusifikasi tersebut, dengan begitu akan terjadinya suatu kultur budaya yang berbeda antara Rusia dengan republik-republik yang bergabung dalam rusifikasi Rusia. Dengan begitu banyak gerakan separatisme yang tidak mau ikut dalam penyatuan Rusia yang dikarenakan republik-republik yang telah bergabung diberlakukan tidak adil, dimana yang paling diutamakan adalah pemerintahan pusat di Kremlin.

Maka gerakan komunis yang dulu diterapkan oleh Lenin mulai ditinggalkan dan memulai sistem keterbukaan yaitu demokrasi yang telah dicetuskan oleh Gorbachev (*perestroika*, *glasnost*, *demokratizatsiya*).

Dengan begitu jelas bahwa separatisme, konflik etnis dan gejala etnonasionalisme telah muncul dari adanya sebuah otoriter etnis minoritas (Rusia) yang telah menguasai pemerintahan dan diskriminasi terhadap etnis republik-republik di Uni Soviet. Dan tidak adanya sebuah kerjasama dengan para etnis lain, selain etnis Rusia. Ketidakadilan inilah banyak

republik – republik Uni Soviet tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Uni Soviet dan dalam sebuah program atau revolusi yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev telah memicu terhadap disintegrasi Uni Soviet.

#### **E. Hipotesa.**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut:

*Karena Reformasi Gorbachev telah memberi ruang gerak terhadap gerakan etnonasionalisme yang menyebabkan disintegrasi Uni Soviet”.*

#### **F. Metode Penelitian.**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang berasal dari buku–buku, jurnal–jurnal, majalah, internet, dan tulisan–tulisan ilmiah lainnya yang kiranya akan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dimana data – data tersebut sesuai dengan topik bahasan skripsi ini.

#### **G. Jangkauan Penelitian.**

Penelitian ini akan mencakup kurun waktu sejak masa pemerintahan Mikhail Gorbachev tahun 1985 sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan karena tulisan ini mengungkapkan asal mulanya gerakan etnonasionalisme maka secara garis besar akan membahas konflik sebagai berikut :

1. sejarah perkembangan gerakan etnonasional yang menyebabkan disintegrasi Uni Soviet dan faktor-faktor yang menyebabkan konflik muncul.
2. Reformasi Yang dilakukan oleh Gorbachev telah membuka bagi Gerakan separatis untuk memisahkan diri dari negara Uni Soviet.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Tulisan ini disusun melalui pendekatan fakta dan data yang terjadi dalam rentang waktu yang meliputi sebelum dan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev terhadap kebijakan Etnonasional dan perkembangan gerakan Etnonasionalisme terhadap pembubaran Uni Soviet. Secara garis besar tulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I, menggambarkan secara singkat keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu, alasan pemilihan judul, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, menggambarkan sebab - sebab terjadinya gerakan etnonasionalis dengan adanya proses kemunculan rusifikasi pada Periode Pra-Bolshevik (Tsar) dan Periode Komunisme Uni Soviet, juga menjelaskan Kristen Ortodok Bersifat Mesianisme Rusia. Dan Kebijakan pemerintahan Uni Soviet terhadap etnis non-Russian. Dan Kultur Budaya Yang Berada Di Uni Soviet Dan Komposisi Etnonasional.

BAB III, Reformasi yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev, lewat Glasnost, Perestroika, Demokratizatziya membangkitkan gerakan etnonasionalis

terhadap disintegrasi Uni Soviet, bagaimana Dampak Perestroika Terhadap Gerakan Etnonasionalis dan PKUS (Partai Komunis Uni Soviet).

BAB IV, Bagaimana gerakan etnonasionalisme memanfaatkan Reformasi Gorbachev untuk menghasilkan tuntutan kemerdekaan dengan dilihat dalam Tuntutan gerakan etnonasionalis terhadap Pemerintahan Gorbachev dan Kegagalan Gorbachev dalam memahami aspirasi Etnonasionalisme juga perkembangan masalah Etnonasionalisme Menjelang Disintegrasi Uni Soviet seperti kemunculan gerakan-gerakan kemerdekaan di Georgia dan Baltik dan kemunculan gerakan Etnonasionalis dalam perpektif Budaya.

BAB V, kesimpulan dari berbagai variabel – variabel yang ada dalam kebijakan – kebijakan etnonasionalis, serta sebuah reformasi Mikhail Gorbachev yang membuka jalan bagi gerakan etnonasionalisme untuk bisa berpisah dari pemerintahan Uni Soviet.